

## Pj Gubernur Banten Minta Investor Tidak Ragu Bisnis Kopi di Banten

**SERANG (IM)**- Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, saat ini, perkembangan produksi kopi di Provinsi Banten sangat pesat, sehingga bagi para investor jangan ragu-ragu untuk bisnis kopi di Banten.

"Kita mengelola kopi dengan baik, kita akan mendapatkan nilai tambah dalam kegiatan pembangunan Provinsi Banten ke arah yang lebih baik dalam sektor komoditas kopi. Maka dari itu, bagi investor, jangan ragu untuk melakukan agenda bisnis kopi di Banten," kata Al Muktabar di Serang, Sabtu kemarin.

Menurut Al Muktabar, stok kopi di Banten dari hulu sampai tingkat hilirnya sudah terjaga dengan baik kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu, kata Al Muktabar, basis yang akan dilakukan dalam optimalisasi sektor usaha kopi adalah 'top down' dan bottom up. Secara bottom up itu kedai-kedai kopi sudah bertebaran di wilayah Provinsi Banten.

"Kita tingkatkan itu agar menjadi lebih besar dengan dukungan Pemprov untuk melakukan pengembangan usaha dari hulu sampai hilir. Artinya kita akan terus mengembangkan itu sebagai bentuk Pemerintah hadir," kata Muktabar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distan) Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengatakan, ada tiga jenis varian kopi lokal Banten yang menjadi unggulan didominasi oleh Robusta, kemudian ada juga arabika serta kopi bubuk varietas Amerika.

"Uniknya varian kopi yang ada di Banten itu tidak ada di daerah lain, hanya di sini," katanya. Ia mengatakan, Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah dengan produksi kopi lokal yang mencapai 2.000 ton per tahun.

Atas potensi itu, kata Agus, secara stok di tingkat hulu Provinsi Banten terbilang aman, karena lahan para petaninya juga terjaga dengan baik. Selain itu, Pemprov juga ikut intervensi kepada para petani kopi, dari mulai penyemaian, pembibitan sampai ketika panen dan pasca panen.

"Ke depan kita juga akan melakukan hilirisasi terhadap produk turunan dari kopi ini, yang bisa dibuat pewangi atau produk lainnya," kata Agus. ● pra

## Penyerapan APBD Banten Perubahan Ditengat 44 Hari

**SERANG (IM)**- Seluruh OPD di lingkup Pemprov Banten sudah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Perubahan tahun anggaran 2022.

Dengan adanya penambahan belanja sekira Rp760 miliar, maka OPD diminta untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran di akhir tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, batas akhir penyerapan anggaran tahun ini yakni 30 Desember.

"OPD tinggal memiliki waktu 44 hari kerja efektif," ujar Rina usai penyerahan DPA APBD Perubahan tahun anggaran 2022 di gedung Pendopo Gubernur Banten, kemarin.

Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, pihaknya telah melakukan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Banten untuk melakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2022. Salah satu isinya adalah terkait dengan penyelesaian mandatori kewajiban untuk pembelanjaan.

Kata Rina, pihaknya sudah melakukan perhitungan. Untuk itu, OPD perlu memerlukan upaya optimalisasi belanja.

"Mapping per hari apa yang harus dilakukan karena pengadaan barang dan jasa sudah dari awal. Sekarang tinggal mulai membayar melakukan evaluasi percepatan kepada pihak ketiga agar progresnya cepat," ujarnya.

Untuk optimalisasi, Rina mengaku pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran Penjabat Sekda Banten tentang langkah-langkah pengelolaan keuangan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2022 dan menjelang awal tahun anggaran 2023.

"Harapannya bahwa sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditandatangani seluruh kepada OPD, pencapaian target terhadap volume kerja dan pembiayaan yakni serapan atau belanja akan lebih baik lagi," ujar Al.

Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,4 triliun atau lebih meningkat 7,4 persen dibandingkan sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun lebih.

Alokasi belanja daerah dianggarkan sebesar Rp11,9 triliun atau lebih meningkat 6,6 persen dibandingkan sebelumnya sebesar Rp11,2 triliun lebih. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp530,4 miliar lebih digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga telah memenuhi alokasi belanja mandatori/belanja yang telah diarahkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yaitu fungsi pendidikan sebesar 24,40 persen dari syarat minimal 20 persen; anggaran kesehatan sebesar 17,35 persen dari syarat minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar gaji.

Kemudian belanja pengembangan sumber daya manusia sebesar 0,47 persen dari total belanja daerah paling sedikit 0,34 persen; belanja penguasaan sebesar 0,62 persen dari total belanja daerah paling sedikit 0,30 persen; dan belanja pegawai sebesar 19,23 persen dari total belanja daerah paling banyak 30 persen.

Selain itu, Al mengatakan, Pemprov Banten juga telah mengalokasikan anggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, sebesar 2 persen dari dana transfer umum triwulan IV tahun 2022 yaitu Rp10 miliar lebih.

Selanjutnya sesuai kebijakan, Pemprov juga telah mengalokasikan anggaran penanganan dampak inflasi dari belanja tidak terduga sebesar Rp34,7 miliar lebih, sehingga untuk penanganan dampak inflasi telah dialokasikan sejumlah Rp45,3 miliar lebih yang disalurkan kepada 75.613 penerima manfaat. pra

## Memprihatinkan, Ibu Hamil Harus Ditandu Saat Hendak Melahirkan

**PANDEGLANG (IM)**- Kejadian memprihatinkan menimpa seorang pasien ibu hamil yang hendak melahirkan menuju fasilitas kesehatan atau Poskesdes, videonya viral di media sosial. Diketahui dari percakapan sejumlah warga dalam video tersebut, nampak peristiwa penanduan itu terjadi di Kampung Babakan Sawah, Desa Leuwibalang, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Sabtu (29/10).

Dari informasi yang berhasil dihimpun, pasien ibu hamil yang ditandu sejumlah warga menuju Poskesdes tersebut bernama Asmariah (21). Jarak yang ditempuh warga dalam menandu pasien tersebut sepanjang 1 kilo meter.

Pasien terpaksa harus ditandu oleh warga dengan menggunakan kain sarung lantaran kondisi jalan rusak parah, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

"Rencananya mau melahirkan dibawa ke puskesmas dengan jarak 7 kilo meter, Alhamdulillah ada badan yang diutus oleh puskesmas yang diutus ke Poskesdes Leuwibalang, jadi dari rumah pasien ke Poskesdes hanya berjarak 1 kilo meter," ungkap Angga, salah seorang warga setempat.

Menurutnya, jarak rumah pasien ke Puskesmas sejauh 7 kilometer, lantaran kondisi infrastruktur jalan yang buruk akhirnya ia harus ditandu sejauh 1 kilometer untuk di bawa ke Poskesdes Leuwibalang.

"Setelah ditangani pihak bidan dari Puskesmas, proses persalinan berjalan lancar," katanya.

Dijelaskannya, kondisi jalan yang buruk di kampung hingga kendaraan roda empat sulit dilalui, hanya kendaraan tertentu saja yang bias lewat.

Itupun sangat beresiko tinggi bagi pasien yang hendak melakukan persalinan. "Memang kondisi jalannya rusak parah sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Kecuali mobilnya tinggi, mungkin baru bisa melalui jalan ini. Tapi kalau bawa pasien ibu hamil cukup beresiko," ujarnya.

Terpisah, Camat Cikeusik, Pandeglang, Wahyu membenarkan adanya peristiwa warga yang menandu pasien yang hendak melakukan persalinan menuju fasilitas kesehatan.

Alasan pasien itu ditandu lanjut Camat, lantaran kondisi jalan dari kediaman pasien menuju Poskesdes melalui jalan perhutani dengan kondisi jalan setapak. "Tapi setelah melewati jalan perhutani masuk ke jalan desa. Tapi kalau sudah di jalan desa memang kendaraan bisa masuk," tuturnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (29/10).

Saat ditanya pihak mana yang punya kewenangan menangani jalan tersebut, Camat mengaku, kalau jalan Perhutani mungkin pihak Perhutani tapi kalau jalan desa itu pemerintahan desa. "Kalau akses jalan Perhutani memang kondisinya tidak bisa dilalui kendaraan, soalnya jalan setapak. Tapi kalau sudah masuk jalan desa memang mobil bisa masuk," pungkasnya. ● pra



### PAMERAN ANDUM BINGAR

Pengunjung melihat karya saat pameran 'Andum Bingar' di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Gondomanan, Yogyakarta, Minggu (30/10). Pameran Andum Bingar yang menampilkan karya seni rupa dan fotografi unit kegiatan mahasiswa Serufu Universitas Negeri Yogyakarta tersebut memaknai tentang rasa bahagia.

## DPRD Minta Bupati Pandeglang Serius Tangani Akses Jalan

Bupati Pandeglang harus turun ke lapangan melihat kondisi yang sebenarnya untuk meyakinkan bahwa sangat penting pembangunan infrastruktur di wilayah itu, agar taraf hidup mereka (masyarakat-red) meningkat.

**PANDEGLANG (IM)**- DPRD Pandeglang, prihatin atas adanya seorang pasien ibu hamil yang hendak melakukan persalinan harus ditandu oleh warga dengan menggunakan kain sarung.

Anggota DPRD dari Komisi IV tersebut juga meminta,

Pemkab Pandeglang serius menangani akses jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan, lantaran miris ketika melihat pasien harus ditandu memakai kain sarung.

"Ini gak bisa dibiarkan harus segera ditangani, ini persoalan infrastruktur jalannya sehingga tidak selesai-selesai

masyarakat kalau ada yang sakit mau dibawa ke Puskesmas harus ditandu," ungkap Habibi Arafat, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Minggu (30/10).

Kata Habibi, tinggal keseriusan Pemkab Pandeglang saja sebenarnya untuk membangun akses jalan utama di Desa Leuwibalang, Kecamatan Cikeusik.

Karena kata dia, pihaknya sebagai anggota wakil rakyat di DPRD Pandeglang, sudah beberapa kali mengajukan jalan itu untuk dibangun tapi sampai saat ini belum juga dibangun.

"Bingung saya juga, kenapa ini Desa Leuwibalang tidak jadi prioritas untuk dibangun.

Sedangkan kalau tidak juga dibangun akses jalannya, pelayanan kesehatan dan perekonomian masyarakat tetap akan terpuruk, kasian masyarakat kalau terus dibiarkan seperti itu," ujarnya.

Maka pihaknya berharap, Bupati Pandeglang harus turun ke lapangan melihat kondisi yang sebenarnya untuk meyakinkan bahwa sangat penting pembangunan infrastruktur di wilayah itu, agar taraf hidup mereka (masyarakat-red) meningkat.

"Kami harap Bupati Pandeglang, Irna Narulita turun ke lapangan dan lihat kondisi jalan yang sebenarnya. Yakinkan bahwa sangat penting pemban-

gunan jalan bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar," pintanya.

Terpisah, Camat Cikeusik, Wahyu mengaku, bahwa kampung yang menjadi tempat pasien yang ditandu itu tinggal lokasinya berada di kawasan Perhutani. Akses jalan menuju Poskesdes dari kediaman pasien tersebut jalan setapak yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan.

"Kampung pasien itu ada di kawasan Perhutani. Jalannya itu jalan kehutanan dan hanya jalan setapak, jadi pasien itu harus ditandu menuju Poskesdes karena akses jalan tidak bisa masuk kendaraan roda empat," imbuhnya. ● pra

### KAPOLRI LARANG TILANG MANUAL

## Jalanan Kota Tangerang Segera Dipasang ETLE

**TANGERANG (IM)**- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengintruksikan agar tilang manual atau langsung kepada pelanggar lalu lintas segera ditiadakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pungli yang kerap terjadi saat tindakan tilang langsung. Satlantas Polres Bogor mengganti tindakan tilang tersebut dengan meminta pelanggar lalu lintas membaca Alquran atau menghafal Pancasila.

Sementara itu, Satlantas Polres Metro Tangerang hanya akan menegur pengemudi yang kedapatan melanggar lalu lintas dengan teguran simpatis sambil menunggu electronic traffic law enforcement (ETLE) rampung. "Seperti perintah, kita sudah tidak ada penilangan manual, sambil menunggu ETL E sekarang sifatnya teguran simpatis agar masyarakat tertib berjalannya," ujar Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Joko Sembodo, kemarin.

Teguran simpatis yang dimaksud adalah dengan mengedukasi pelanggar lalu lintas mengenai keselamatan dalam berkendara. Selain itu, pelanggar juga diedukasi bahaya dan kerugian apabila melanggar aturan lalu lintas. "Teguran jang mengulangi lagi pelanggarannya, karena sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain," lanjutnya.

Sementara itu, saat ini Polres Metro Tangerang Kota sudah melakukan survei di lokasi yang akan

diberlakukan ETL E. Hingga saat ini ada sebanyak enam unit ETL E yang akan dioperasikan di wilayah hukum (wilayah) Polres Metro Tangerang Kota. "Saat ini sudah tahap survei ke titik-titik lokasi. Dan sesuai dengan arahan Kapolri tahun 2023 ETL E sudah siap dan jumlahnya ada enam unit," lanjutnya.

Enam unit ETL E tersebut rencananya akan diletakkan di enam titik, di antaranya yakni kawasan Jalan Daan Mogot, Jalan Jenderal Sudirman, Kebon Nanas, dan Jatiusung. Saat ini, pihaknya masih melakukan persiapan untuk menerapkan tilang elektronik, terutama berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang. "Kami kerjasama dengan Pemkot terkait anggarannya. Untuk realisasinya masih menunggu Pemkot, kami upayakan secepatnya," tuturnya.

Penghapusan tilang konvensional yang diganti dengan tilang elektronik juga dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pungli oleh oknum polisi

yang berurusan dengan tilang elektronik yang dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pungli oleh oknum polisi yang berurusan dengan tilang elektronik yang dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pungli oleh oknum polisi

yang berurusan dengan tilang elektronik yang dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pungli oleh oknum polisi yang berurusan dengan tilang elektronik yang dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pungli oleh oknum polisi

yang berurusan dengan tilang elektronik yang dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pungli oleh oknum polisi yang berurusan dengan tilang elektronik yang dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pungli oleh oknum polisi

## Awas Macet, Jalan Layang Cisauk Tangerang Mulai Dibangun

**TANGERANG (IM)**- Jalan layang atau Flyover Cisauk, Kabupaten Tangerang, mulai dibangun ditandai dengan telah dilakukannya peletakan batu pertama. Ground breaking pembangunan jalan layang dengan anggaran senilai Rp96,8 miliar tersebut dilakukan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar pada Sabtu (29/10) kemarin.

Pembangunan tersebut sempat tertunda karena anggarannya dialihkan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pembangunan jalan layang Cisauk yang merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Tangerang ini diproyeksikan rampung pada awal September 2023.

"Berharap masyarakat Cisauk, Pagedangan, dan sekitarnya

bisa ikut mendukung percepatan pembangunan Flyover Cisauk, dan mohon maaf manakala pembangunan flyover menimbulkan kemacetan," ucap Zaki.

Jika sudah rampung, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta ini mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawatnya. Ia menyebut, keberadaan jalan layang Cisauk ini sangat bermanfaat untuk jalur transportasi masyarakat. Kepala Dinas Binamarga SDA Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah mengatakan, Flyover Cisauk ini memiliki panjang 1.090 meter. "Panjang jembatan 525 meter, lebar lajur 11 meter," katanya.

Adapun masa pelaksanaan pengerjaannya selama 395 hari. "Nilai kontraknya Rp96,8 milyar yang dikerjakan PT. Pandji Bangun Persada," pungkasnya. ● pp

## Bupati Tangerang : Pembangunan PIK 2 untuk Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

**TANGERANG (IM)**- Bupati Tangerang mengantar peserta PEMSEA melakukan kunjungan ke Pantai Indah Kosambi (PIK 2), Kamis (27/10/22) dan juga ke Ketapang Aquaculture Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Jumat (28/10).

Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar mengatakan kepada peserta PEMSEA di lokasi PIK 2, bahwa ini adalah salah satu pembangunan yang diinisiasi oleh mitra swasta pengembangan perumahan.

"Bisa dilihat contoh transformasi sesudah dan sebelum dibangun, di mana sebelumnya terdapat kawasan pertambangan yang sudah tidak produktif, tidak bisa ditanami udang, kalau ada ikan tidak begitu banyak, karena banyaknya limbah dan polusi air di sekitar sini," ujarnya.

Lebih lanjut Zaki mengatakan setelah diubah, kawasan ini menjadi daerah yang lebih produktif dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Masih kata Zaki, dengan adanya konsep pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman kota satelit seperti ini, pekerja bisa terserap baik langsung maupun tidak langsung.

"Kita bisa melihat apa

yang terjadi di sebelah Selatan Tangerang, ada pengembangan besar juga di sana, kesejahteraannya lebih baik daripada daerah yang belum terbangun, secara infrastruktur, sosial, dan ekonomi, pasti ada perubahan," ujarnya.

Memang dalam setiap pembangunannya pasti ada kekurangannya, seperti kita membangun rumah pasti ada semen, paku dan kayu yang berserakan, begitu juga dengan kawasan yang besar ini. Tetapi goal dari pembangunan itu sendiri dapat kita lihat hasilnya.

Dikatakan Zaki untuk yang di Ketapang Mauk, Kabupaten Tangerang, ada skema yang berbeda. "Kalau di PIK 2 di inisiasi oleh pihak swasta, maka berbeda di Ketapang, yaitu memakai anggaran APBD dan APBN, dan di sana lebih mempertahankan permukiman atau kampung nelayan, dengan penambahan fasilitas untuk pergerakan ekonomi UMKM, ada blue ekonomi dan green ekonomi, ada koperasi dan pengembangan kawasan tambak," tuturnya. ● joh

**Efek Domino**  
Diketahui, saat ini di Pantai



Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar saat memberikan keterangan Pers kepada wartawan di Ketapang Aquaculture Mauk Kabupaten Tangerang.